KEPALA OMBUDSMAN BANTEN BERGANTI, INI DIA SOSOKNYA

Senin, 12 Desember 2022 - Rizal Nurjaman

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten berganti. Awidya Mahadewi digantikan Fadli Afriadi. Sertijab tersebut digelar di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang.

Fadli Afriadi sebelum menjabat sebagai kepala perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten dia merupakan Peneliti di Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor (IPB) dan aktif sebagai pelaku serta pembina UMKM.

Sementara Awidya Mahadewi akan bertugas sebagai kepala Keasistenan Utama Ombudsman RI Pusat. Dalam pelantikan tersebut turut hadir Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, dan para tamu undangan lainnya.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra mengatakan tugas terdekat kepala perwakilan yang baru dapat menangani persoalan pelayanan publik yang belum diselesaikan.

"Kepala perwakilan sekarang harus memiliki langkah-langkah, seperti kreativitas serta inovasi dalam menyelesaikan laporan masyarakat," ucap Yeka kepada JPNN Banten, Jumat (9/12). Yeka menjelaskan persoalan dapat diselesaikan dengan cepat asalkan sama-sama menjaga muruah serta membangun koordinasi.

"Jadi, kalau ada masalah sampaikan dengan pejabat yang bersangkutan. Dengan komunikasi saya yakin penyelesaian akan lebih cepat," ucapnya.

Dia meminta dalam setiap menyelesaikan persoalan tidak selalu harus secara prosedural. "Jangan terlalu prosedural, misalnya ada kasus harus pakai surat-menyurat.

Kalau perlu bawa kasusnya obrolkan langsung diskusikan itu bisa selesai," katanya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi menambahkan langkah awal pihaknya akan melakukan konsolidasi internal untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

"Kami akan mencari langkah-langkah yang lebih kolaboratif bekerja sama dengan semua pihak terutama pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Banten," ujar Fadli.

Fadli mengatakan permasalahan biasanya terjadi pada pelayanan publik yang mendasar, di antaranya kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

"Setiap persoalan tentang pelayanan publik dapat segera diselesaikan apabila dikerjakan secara bersama-sama," ujarnya. (mcr34/jpnn)